

PENGARUH INVESTASI, PDRB, UMP TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PULAU SUMATERA

Salsabillah Nurul Izza, Joko Suharianto
Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, UNIMED
Email: salsabillahizza12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Sumatera. Objek penelitian yaitu 10 provinsi di Pulau Sumatera dengan periode waktu 2018–2024. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel investasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap TPT. Variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, sedangkan UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPT di Pulau Sumatera. Secara simultan, variabel investasi, PDRB, dan UMP berpengaruh signifikan terhadap TPT. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 90,85% menunjukkan bahwa variasi perubahan TPT di Pulau Sumatera dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 9,15% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Hal ini merupakan peningkatan PDRB mampu menekan angka pengangguran terbuka, sementara kenaikan UMP justru berpotensi meningkatkan pengangguran. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian pengangguran di Pulau Sumatera perlu memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, serta penetapan upah minimum.

Kata kunci: Investasi, PDRB, UMP, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pulau Sumatera.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of investment, Gross Regional Domestic Product (GRDP), and Provincial Minimum Wage (UMP) on the Open Unemployment Rate (TPT) in Sumatra. The study subjects were 10 provinces in Sumatra over the 2018–2024 period. The method used was panel data regression analysis to determine the partial and simultaneous effects. The results showed that partially, the investment variable had a negative but insignificant effect on the TPT. The GRDP variable had a negative and significant effect on the TPT, while the UMP had a positive and significant effect on the TPT in Sumatra. Simultaneously, the investment, GRDP, and UMP variables had a significant effect on the TPT. The coefficient of determination (R^2) of 90.85% indicates that the variation in changes in the TPT in Sumatra can be explained by these three variables, while the remaining 9.15% is explained by other variables outside the study.

This means that an increase in GRDP can suppress open unemployment, while an increase in the Provincial Minimum Wage (UMP) could potentially increase unemployment. Therefore, unemployment control policies on Sumatra

Island need to balance economic growth, the investment climate, and minimum wage determination.

Keywords: Investment, GRDP, UMP, Open Unemployment Rate, Sumatra Island

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting bagi perekonomian Indonesia. Populasi penduduk Indonesia yang tinggi memunculkan tantangan tersendiri bagi Pemerintah terkait masalah ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 yang berjudul Statistik Indonesia 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275.461.700 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih di angka 1,38 persen per tahun. Hasil proyeksi penduduk oleh BPS, pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai lebih dari 300 juta jiwa di mana populasi penduduk Indonesia lebih didominasi oleh kelompok umur produktif yakni antara 15-64 tahun. Hal ini membuat Indonesia memasuki era bonus demografi di mana usia produktif dapat dimanfaatkan dalam peningkatan pembangunan atau menjadi beban bagi perekonomian seperti meningkatnya pengangguran.

Pengangguran menjadi salah satu permasalahan utama ketenagakerjaan yang dihadapi negara berkembang, termasuk Indonesia. (Muslim, 2014) menjelaskan bahwa pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola

yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Kaufman dan Hotchkiss (1999) menyebutkan bahwa tingkat pengangguran merupakan salah satu ukuran efisiensi dalam perekonomian. Ketika pengangguran terjadi, beberapa input tenaga kerja yang tersedia tidak digunakan, yang berarti hilangnya produksi. Selain dampak dari perlambatan ekonomi, populasi penduduk Indonesia yang besar memunculkan angkatan kerja baru tiap tahunnya sehingga berdampak pada tingkat pengangguran. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat. Dengan banyaknya jumlah penduduk dalam suatu negara mengakibatkan masalah-masalah sosial muncul seperti pengangguran terbuka (Dominick & Munandar, 1997) Pengangguran merupakan permasalahan perekonomian yang mempunyai dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Dengan ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, dan jumlah pekerja terus bertambah, muncul lah sebuah permasalahan yang harus diatasi oleh negara-negara berpenduduk banyak, khususnya Indonesia.

Pengangguran terbuka telah menjadi masalah di mana orang-orang dalam kategori angkatan kerja yang ingin

bekerja, namun tidak mendapatkannya. (Sukirno, 2008) dan orang yang tidak bekerja tetapi tidak aktif mencari pekerjaan tidak tergolong pengangguran. (Dominick & Munandar, 1997). Pengangguran merupakan permasalahan yang kompleks, lebih serius dibandingkan perubahan distribusi pendapatan yang tidak merugikan masyarakat berpendapatan rendah. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi mempunyai implikasi terhadap kesejahteraan. Pengangguran menyebabkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya (Sukirno, 2006) Indikator yang digunakan untuk melihat tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka, yang dihitung dengan menggunakan jumlah total pengangguran dan angkatan kerja kemudian dikalikan 100 sehingga diperoleh satuan persen.

Tingkat pengangguran terbuka menjadi permasalahan karena penggunaan sumber daya manusia yang tidak tepat mengakibatkan rendahnya produktivitas. Rendahnya konsumsi akibat tingkat upah yang tidak fleksibel menyebabkan daya beli masyarakat turun. Kondisi buruk tersebut mengakibatkan timbulnya masalah pengangguran akibat kurangnya permintaan terhadap tenaga kerja. Apabila masalah pengangguran tidak segera diatasi maka akan mengakibatkan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial (BPS, 2018)

2. KAJIAN TEORI

Pengangguran

Pengangguran merupakan fenomena sosial dan ekonomi yang terjadi ketika individu yang termasuk dalam

angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Menurut (Sukirno, 2006), pengangguran didefinisikan sebagai seseorang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak hanya melibatkan individu yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi juga mereka yang sedang aktif mencari kerja. Pengangguran dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengacu pada nilai agregat barang atau jasa yang diperoleh dari seluruh aktifitas ekonomi selama jangka waktu tertentu. PDRB terdiri atas PDRB riil dan PDRB nominal. PDRB riil adalah PDRB yang dinilai berdasarkan harga konstan, sementara

Upah Minimum Provinsi

Menurut (Sukirno, 2008) Yang dimaksud dengan upah adalah pembayaran atau jasa yang diberikan pekerja kepada perusahaan. Jadi, dalam teori ekonomi tidak ada perbedaan antara pembayaran atas jasa pekerja dan profesional dan pembayaran atas jasa kasar dan tidak teratur. Kedua jenis pendapatan pekerja ini disebut upah. Dengan demikian, upah merupakan pembayaran yang diterima pekerja dari perusahaan atas jasa fisik dan mental yang telah mereka sumbangkan kepada perusahaan.

Upah minimum provinsi yang disingkat UMP adalah upah minimum yang berlaku bagi seluruh daerah/kota

dalam wilayah satu provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Upah minimum provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Gubernur, Dewan Pengupahan Daerah dan/atau Wali Kota/Walikota. UMP digunakan sebagai standar upah minimum bagi pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja yang disesuaikan berdasarkan ketentuan provinsi tempat perusahaan tersebut berada.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berjenis kuantitatif, karena pada dasarnya penelitian kuantitatif menggunakan angka sebagai ukuran datanya. Data kuantitatif ini berupa data panel, yaitu kombinasi antara data time series dan data cross section. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera dengan memperoleh data dari website Badan Pusat Statistik Provinsi.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder (Abdullah & Kholila Siregar, n.d.; Ikhsan et al., 2018) mengatakan bahwa data sekunder mengacu pada informasi penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber-sumber yang telah dipublikasikan, seperti artikel ilmiah, majalah, dan laporan sejarah yang tersimpan dalam arsip.

Sumber Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari data yang telah tersedia di Badan Pusat Statistik Provinsi.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian

Variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) adalah dua kategori variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Y akan mewakili variabel dependen dan X akan mewakili variabel independen. Ada empat variabel dalam penelitian ini tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel tingkat pengangguran dapat dipandang sebagai dependen atau sebagai variabel Y yang di pengaruhi oleh Variabel X. Meskipun Investasi (X1) adalah variabel independen pertama, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2) adalah yang kedua, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) (X3) adalah yang ketiga serta variabel terikat yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (Y).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Intercept Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera

Dalam pengujian persamaan regresi dapat diketahui Provinsi yang memiliki koefisien positif dan negatif. Berdasarkan hasil estimasi fixed effect cross-section, diketahui bahwa terdapat perbedaan karakteristik tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada masing-masing provinsi di Pulau Sumatera selama periode penelitian 2018–2024. Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) memiliki nilai koefisien paling tinggi sebesar 4,761896, yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di provinsi ini cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi lainnya. Hal serupa juga terlihat pada Kepulauan Riau (KEPRI) dengan nilai 3,246715, serta Riau sebesar 3,202827, yang mengindikasikan bahwa kedua provinsi tersebut juga memiliki tingkat pengangguran yang relatif tinggi.

Sementara itu, beberapa provinsi memiliki koefisien yang mendekati nol, seperti Lampung sebesar 0,344622, yang berarti tingkat pengangguran di provinsi ini hampir sama dengan rata-rata. Sumatera Barat (SUMBAR) dan Sumatera Selatan (SUMSEL) juga memiliki nilai yang sedikit positif, masing-masing sebesar 0,675235 dan 1,164233, menunjukkan bahwa TPT di kedua provinsi ini berada sedikit di atas rata-rata.

Sebaliknya, beberapa provinsi menunjukkan nilai koefisien negatif yang berarti tingkat pengangguran lebih rendah dibanding rata-rata provinsi lainnya. Bengkulu memiliki nilai koefisien paling rendah yaitu -6,504455, diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung (KEPBABEL) sebesar -5,314996, serta Jambi sebesar -1,299940. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di provinsi-provinsi tersebut relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Sumatera.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap provinsi memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Riau memiliki masalah pengangguran yang lebih serius, sementara provinsi seperti Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jambi relatif memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dari rata-rata. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing provinsi agar penanganan pengangguran dapat lebih efektif.

Menurut (Amalia, 2012) pengangguran merupakan kondisi di mana individu yang merupakan bagian dari angkatan kerja berupaya untuk mendapatkan pekerjaan, namun belum mampu memperolehnya. Secara individual pengangguran menyebabkan masalah ekonomi dan sosial bagi mereka yang terkena dampak.

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau di Indonesia yang hampir sepertiga dari jumlah provinsi di Indonesia. Menurut dari BPS tingkat pengangguran di Pulau Sumat-era masih tinggi. Beberapa provinsi di Pulau Sumatera memiliki tingkat pengangguranterbuka di atas level nasional. Pulau Sumatra merupakan pulau yang kaya dengan hasilbumi. Dari lima provinsi kaya di Indonesia, tiga provinsi terdapat di pulau Sumatra, yaitu provinsi Aceh, Riau dan Sumatra Selatan. Hasil-hasil utama pulau Sumatra ialah kelapa sawit, tembakau, minyak bumi, timah, bauksit, batu bara dan gas alam. Hasil-hasilbumi tersebut sebagian besar diolah oleh perusahaan-perusahaan asing. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera cukup baik tetapi memiliki tingkat pengangguran terbuka yang tinggi dibandingkan provinsi di pulau lain..

Pengangguran terbuka pada umumnya mempengaruhi generasi muda baru. menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Mereka yang baru saja menyelesaikan studinya cenderung mencari pekerjaan yang sesuai dengan aspirasinya. Cita-cita mereka pada umumnya adalah bekerja di sektor modern atau di perkantoran. Untuk mendapatkan pekerjaan, mereka bersedia menunggu beberapa saat. Mereka mungkin mencari pekerjaan di kota, provinsi, atau daerah di mana aktivitas industri telah berkembang. Inilah sebabnya mengapa tingkat pengangguran yang dilaporkan cenderung cukup tinggi di kota-kota atau wilayah tersebut. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka rendah terjadi di daerah atau provinsi yang kegiatan ekonominya masih bertumpu pada sektor tradisional, terutama jika tingkat pendidikannya tinggi. di area ini masih lemah.

Menurut teori ekonomi Keynesian dalam (Sukirno, 2006) menjelaskan variabel lain yaitu pemerintah juga berpengaruh dalam hal

ini adalah anggaran dijadikan salah satu faktor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Tidak berpengaruhnya pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran terbuka dikarenakan pengeluaran pemerintah provinsi-provinsi di Sumatera tidak mengalokasikan anggaran-anggaran pengeluaran pemerintah ke kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja, namun banyak pengalokasian terhadap kegiatan internal dan belanja pegawai.

Secara teori, investasi seharusnya dapat menciptakan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran (Todaro & Smith, 2015). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan arah yang berlawanan, yaitu peningkatan investasi justru meningkatkan TPT. Kondisi ini dapat terjadi jika investasi yang masuk bersifat padat modal (*capital intensive*), sehingga perusahaan lebih mengandalkan teknologi dan mesin dibandingkan tenaga kerja. Akibatnya, walaupun investasi meningkat, kesempatan kerja yang tercipta tidak sebanding, bahkan dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena efisiensi produksi.

Menurut Mankiw (2018), investasi juga dapat menimbulkan efek jangka pendek yang tidak langsung mengurangi pengangguran karena butuh waktu untuk menyerap tenaga kerja setelah proyek investasi berjalan. Hal ini sesuai dengan karakteristik pembangunan di beberapa daerah di Sumatera, di mana sebagian besar investasi terkonsentrasi di sektor industri pengolahan dan perkebunan besar yang padat modal.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan rumah bagi sebagian besar masyarakat miskin, seperti terlihat dari peningkatan angka kemiskinan setiap tahunnya, yang disebabkan oleh jumlah penduduk di wilayah tersebut, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Berdasarkan statistik pada tahun 2011 hingga 2022, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau terlihat tidak

menentu dan rentan terhadap variasi. rata-rata tingkat pengangguran tertinggi kedua dan ketiga terjadi pada Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan tingkat pengangguran selama tiga tahun terakhir sebesar 7,13 persen dan 7,07 persen. Seharusnya pemerintah di provinsi Riau dan Kepulauan Riau harus bisa menekan tingkat pengangguran dengan memperluas lapangan pekerjaan di masing-masing daerahnya sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di daerahnya masing-masing.

Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan estimasi yang dilakukan didapatkan bahwa investasi memiliki nilai koefisien sebesar 0,208346 dengan probabilitas sebesar $0.0329 < 0.05$. Ini berarti bahwa Investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan. Artinya, peningkatan investasi sebesar 1% akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,208%, (variabel lain tetap).

Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian dimana Investasi berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Menurut Keynes, selalu ada masalah pengangguran dalam perekonomian dan penggunaan kesempatan kerja penuh jarang diterapkan (Sukirno, 2008). Menurut definisi Statistics Finland, penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sedangkan bekerja adalah kegiatan yang dilakukan seseorang paling sedikit selama satu jam (terus menerus) dalam seminggu terakhir untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Penduduk usia kerja dibagi menjadi angkatan kerja, yang meliputi mereka yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan, dan penduduk tidak aktif, yang bersekolah dan mengurus rumah.

Hal ini tidak berjalan sesuai dengan Hukum Okun dan juga beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah tenaga kerja maka semakin besar daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sehingga pertumbuhan industri dapat meningkat. Tenaga kerja yang melimpah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi karena tersedianya tenaga kerja untuk proses produksi. Produktivitas ini dihargai dalam bentuk upah atas produksi barang atau jasa. Namun, dalam banyak kasus ternyata upah yang dibayarkan tidak proporsional dengan produktivitas yang ditawarkan. Itulah sebabnya kebijakan upah minimum diusulkan. Kebijakan-kebijakan ini terbukti membantu masyarakat berpendapatan rendah dan pekerja muda, mengurangi kesenjangan pendapatan dan melawan kemiskinan (Paramartha & Suasih, 2021).

Menurut teori Harrod Domar dalam (Stefanus, 2017), dalam teorinya investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya dengan semakin besar kapasitas produksi maka akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula, dengan asumsi full employment. Hal ini karena investasi merupakan penambahan faktor-faktor produksi, salah satunya faktor produksi adalah tenaga kerja.

Menurut teori investasi Harrod-Domar (Arsyad, 2010) pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal ini dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan. Teori ini menyatakan pembentukan modal tidak hanya dianggap sebagai pengeluaran yang akan meningkatkan kapasitas perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat.

Dengan begitu perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap

tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga partisipasi angkatan kerja akan semakin meningkat. Pemerintah menetapkan upah minimum yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan harian tetap. Ini adalah penghargaan yang diterima karyawan secara teratur dan berkala dan dikaitkan dengan keberadaan atau pencapaian prestasi tertentu. Setiap daerah memiliki tingkat gaji yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan produktivitas daerah.

Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan estimasi yang dilakukan didapatkan bahwa PDRB memiliki nilai koefisien sebesar -3,740989 dengan probabilitas sebesar $0.0001 < 0.05$. Ini berarti bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Ini menjelaskan bahwa kenaikan Investasi sekitar 1% akan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka sekitar 3.74% persen.

PDRB didefinisikan sebagai total nilai tambah yang diproduksi oleh semua unit bisnis di suatu wilayah, atau sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh semua unit ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin sulit keadaan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan (Todaro, 1999). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berarti produksi jenis jasa dan barang yang dihasilkan juga meningkat dan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Menurut teori ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan PDRB akan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran. Hal ini sejalan dengan hukum Okun (*Okun's Law*), yang menyatakan adanya hubungan negatif

antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran (Mankiw, 2018).

Jika perekonomian suatu daerah berkembang, produksi barang dan jasa meningkat sehingga perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran akan menurun. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aswicahyono dan Hill (2019) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah berpengaruh signifikan dalam menekan pengangguran, khususnya di negara berkembang.

Agar kemunduran dan kemiskinan terus berkurang PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Barang dan jasa yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

Pengangguran merupakan masalah yang kompleks karena mempengaruhi banyak faktor yang saling berinteraksi satu sama lain. Tingkat pengangguran memungkinkan untuk melihat keadaan negara, dalam kondisi perekonomian yang tumbuh atau melambat bahkan gagal. Semakin besar nilai PDRB maka bisa diartikan semakin baik pula kondisi ekonomi di wilayah tersebut, kondisi ekonomi di suatu wilayah itu baik dominan disebabkan oleh pembangunan ekonomi di wilayah tersebut digencarkam, pembangunan di suatu wilayah akan dapat menyerap tenaga kerja sehingga nantinya dapat menurunkan tingkat pengangguran di suatu wilayah (Permadi & Chrystanto, 2021)

Hal ini sejalan dengan hipotesis dimana PDRB telah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam bidang ekonomi yang dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu (Pratiwi & Mariani, 2021). Dengan adanya peningkatan PDRB tentunya akan memberi dampak positif pada perekonomian secara umum, dan akan berdampak positif pada industri yang akan memacu produksi barang dan jasa, sehingga diperlukan lebih banyak pekerja, dan imbasnya akan berpengaruh pada jumlah pengangguran.

Aturan umum adalah bahwa ketika output meningkat, PDRB meningkat dan pengangguran turun sebagai akibat dari meningkatnya permintaan pekerja. Di sisi lain, ketika PDRB turun, permintaan tenaga kerja juga turun. Di sisi lain, faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, pembangunan ekonomi yang tidak merata, dan kurangnya kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan permintaan pasar memperumit hubungan antara PDRB dan pengangguran. Naiknya tingkat PDRB akan menurunkan pengangguran yang ada.

Naiknya tingkat PDRB pasti berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang baik pasti akan ada investasi di dalamnya. Hal ini akan membuka banyak peluang Penanaman Modal pada sektor industri sehingga banyak digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan. Pada pulau Sumatera dominan bergerak pada sektor pertanian. Oleh karena itu, ketika naiknya tingkat PDRB maka pengangguran yang ada akan terserap dan menurunkan angka pengangguran

Teori Samuelson dan Nordhaus dalam (Nuzulaili, 2022) menyatakan angka pengangguran yang tinggi berarti menyia-nyiakan produksi barang dan jasa yang sebenarnya mampu diproduksi oleh pengangguran. Jika tidak segera di atasi, persoalan inilah yang akan berdampak

pada pembangunan Indonesia sendiri, sehingga perlu dipelajari hal-hal yang dapat mempengaruhi pengangguran untuk menemukan solusinya.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan estimasi yang dilakukan didapatkan bahwa PDRB memiliki nilai koefisien sebesar 1,071687 dengan probabilitas sebesar $0.0060 < 0.05$. Ini berarti bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan. Ini menjelaskan bahwa kenaikan UMP sekitar 1% akan meningkatkan Tingkat Pengangguran Terbuka sekitar 1.07 persen.

Penelitian ini sejalan dengan dengan teori Keynes yang menyatakan jika tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran. Ketika tingkat upah naik maka pendapatan pun akan naik, dampaknya adalah daya beli akan naik dan tentu saja pengeluaran masyarakat akan bertambah, maka kapasitas produksi akan ditingkatkan sesuai dengan permintaan barang dan jasa, sehingga perusahaan akan menambah tenaga kerjanya dan penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) akan tercapai. Sebaliknya jika tingkat upah turun akan berpengaruh pada naiknya tingkat pengangguran. (Amrullah et al., 2019)

Menurut teori pasar tenaga kerja klasik, kenaikan upah minimum dapat berdampak ganda. Jika kenaikan upah tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas, maka biaya tenaga kerja perusahaan meningkat, sehingga perusahaan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja atau membatasi perekrutan tenaga kerja baru (Borjas, 2016). Kondisi ini sering disebut sebagai efek *wage rigidity*, di mana upah yang terlalu tinggi menyebabkan jumlah pekerja yang ingin bekerja melebihi jumlah yang dibutuhkan perusahaan. Hal ini berakibat pada peningkatan

pengangguran (Case, Fair, & Oster, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Deliarnov (2020), yang menemukan bahwa kenaikan UMP di beberapa daerah di Indonesia memicu terjadinya PHK, khususnya di sektor padat karya.

Menurut (Oktaviani & Lis Purnamadewi, 2015), permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Jika terjadi peningkatan pasokan tenaga kerja dalam perekonomian, akan terjadi penurunan tingkat upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang diminta akan meningkat. Jika angkatan kerja atau tingkat pengangguran tinggi, ini akan menyebabkan tingginya tingkat upah. Upah yang berlaku di suatu wilayah dapat memiliki efek positif dan negatif.

Menurut (Gilarso, 2004) dampak positif penetapan upah dapat dilihat pada sisi penawaran tenaga kerja, dimana kenaikan upah akan menyebabkan peningkatan penawaran tenaga kerja dan penurunan jumlah pengangguran. Sementara itu, dampak negatif dari penentuan upah adalah ketika upah pekerja meningkat, hal ini menyebabkan penurunan jumlah orang yang bekerja, karena perusahaan mengurangi jumlah pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah pengangguran.

Keynes menjelaskan penurunan tingkat upah akan menurunkan pendapatan, sehingga akan menurunkan daya beli masyarakat termasuk pengeluaran agregat masyarakat, dampaknya kapasitas produksi yang berlebih dari produsen yang akan dijual kepada masyarakat akan menjadi mubazir dan merugikan perusahaan. Sehingga perusahaan akan memberhentikan tenaga kerjanya dan penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) tidak akan tercapai (Putong, 2007) Apabila tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran.

Dimana, pemerintah masih meyakini bahwa upah minimum juga merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki nasib pekerja yang mempunyai penghasilan rendah.

Dampak positif dari penetapan upah dilihat dari penawaran tenaga kerja dimana kenaikan tingkat upah akan menyebabkan penawaran tenaga kerja meningkat, sehingga jumlah pengangguran akan berkurang. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dilihat dari sisi permintaan, semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada wilayah tersebut (Bruce E & Hotchkiss, 1999) mengemukakan bahwa semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

Upah minimum provinsi juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat penghasilan pekerja. Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan sejauh mana masyarakat berusia kerja aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Upah minimum mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Upah minimum berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, yang penting bagi mereka yang bekerja untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Simbolon et al., 2023) terjadi karena adanya penerapan upah minimum di tiap provinsi justru akan mengurangi tingkat permintaan akan tenaga kerja dari sisi perusahaan yang justru pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengangguran.

Hal ini karena UMP menjadi kendala bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi untuk memiliki daya saing. Sehingga dengan adanya

peningkatan UMP tersebut dapat mendorong para perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja dan hal ini menyebabkan peningkatan pada pengangguran. Temuan ini juga sesuai dengan temuan (Prawira, 2018) yang mengemukakan bahwa UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat pengangguran terbuka. Hal ini mengartikan bahwa UMP yang semakin meningkat akan meningkatkan pengangguran terbuka dan sebagaimana pendapat Keynes dalam "The General Theory" menjelaskan bahwa kenaikan dalam kesempatan kerja akan terjadi jika tingkat upah turun.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera (H_0 diterima).
2. PDRB berpengaruh Negatif dan signifikan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera (H_a diterima).
3. UMP (Upah Minimum Provinsi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera (H_a diterima).
4. Secara simultan variabel Investasi, PDRB dan UMP berpengaruh dan signifikan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera (H_a diterima).
5. Investasi, PDRB dan UMP berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera dengan kontribusi sebesar 87% dan

sisanya sebesar 13% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat meningkatkan serta mengalihkan investasi ke sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja seperti Industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, Industri tekstil dan produk lokal serta Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga Memberikan insentif untuk perusahaan yang membuka banyak lapangan kerja. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan program pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
2. Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, pertambangan, infrastruktur, perkebunan serta perdagangan besar dan eceran di tiap Provinsi dimana dengan mengoptimalkan laju pertumbuhan PDRB di seluruh daerah di Pulau Sumatera secara merata sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah serta dengan Memperkuat hilirisasi produk agar nilai tambah tetap berada di dalam daerah. sehingga permintaan tenaga kerja akan meningkat yang akan

berdampak pada jumlah pengangguran yang menurun.

3. Pemerintah Pusat harus adil dalam menentukan kebijakan dalam mengatur penentuan upah minimum agar nantinya dapat mempengaruhi dan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja, hidup layak. Kemudian dengan memberikan subsidi atau keringanan pajak untuk UMKM yang mempekerjakan banyak pekerja. Pemerintah juga diharapkan untuk memperkuat dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh untuk meningkatkan kehidupan yang layak khususnya bagi para pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. (2012). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (Kti)Periode 2001-2010. *Econosains, X, Nomor 2*, 158–169.
- Amrullah, W. A., Istiyani, N., & Muslihatinningsih, F. (2019). Determinant Analysis Of Open Unemployment Rate In Java Island Year 2007-2016. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, Volume Vi (1)*, 43–49.
- Anoraga, Pandji, & Piji Pakarti. (2006). *Pengantar Pasar Modal* (Revisi). Pt Rineka Cipta.
- Anwar, A. (2018). Pendidikan, Kesehatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia: Pendekatan Model Panel Dinamis. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1). <https://doi.org/10.18196/Jesp.19.1.2727>

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (Ke-5, Vols. 978-979-3532-41-7). Unit Penerbit Dan Percetakan Stim Ykpn.
- Aswicahyono, H., & Hill, H. (2019). Regional Economic Growth and Unemployment in Developing Countries. *Journal of Development Studies*, 55(3), 321–338.
- Borjas, G. J. (2016). *Labor Economics*. 7th Edition. McGraw-Hill Education.
- Bps. (2014). *Pertumbuhan Ekonomi 2014*. Bps Indonesia.
- Bps. (2018). Pemodelan Pdrb Sektor Konstruksi Di Jawa Timur Tahun 2010-2015 Dengan Regresi Data Panel. *Jurnal Msa*, 6 No. 2.
- Bruce E, K., & Hotchkiss, J. L. (1999). *The Economics Of Labor Markets*. Bpfe Ugm.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2017). *Principles of Economics*. 12th Edition. Pearson
- Deliamov. (2020). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Rajawali Pers
- Dominick, S., & Munandar, H. (1997). *Ekonomi Intenational* (Vols. 979-411-505-3).
- Filiarsari, A., & Setiawan, A. H. (2021). Pengaruh Angkatan Kerja, Upah, Pdrb, Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten Tahun 2002-2019. *Diponegoro Journal Of Economics, Volume 10, Nomor 2*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. 2009. *Basic Econometrics*. Edisi Kelima. New York: McGraw-Hill/Irwin
- Gilarso. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Vols. 979-21-0398-8). Kanisius.
- Helvira, R., & Putria Rizki, E. (2020). Pengaruh Investasi, Upah Minimum Dan Ipm Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Kalimantan Barat. *I(1)*, 53–62. [Http://E-Journal.Iainptk.Ac.Id/Index.Php/Jiseb](http://E-Journal.Iainptk.Ac.Id/Index.Php/Jiseb)
- Juliprijanto, W., & Septiani, Y. (N.D.). Factors Affecting Open Unemployment Rates In Central Java Province 2011-2019. *Dinamic: Directory Journal Of Economic*, 3(2).
- Krugman, P. R. ., & Obstfeld, Maurice. (2005). *International Economics : Theory And Policy*. Pearson/Addison Wesley.
- Lusiana. (2012). *Usaha Penanaman Modal Di Indonesia* (Vols. 978-979-769-487-6). Raja Grafindo Persada.
- Muslim, M. (2014). *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Rajawali Pers.
- Mankiw Gregory. (2006). *Macroeconomics* (Hardani Wibi, Saat Suryadi, & Barnadi Devri, Eds.; 6th Edition, Vols. Qs60-Bjk-H9ud). Erlangga.
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro : Tinjauan Ekonomi Syariah* (Vols. 978-602-262-200-0). Graha Ilmu .
- Noor, H. F. (2007). *Ekonomi Manajerial* (Vols. 978-979-769-118-9). Rajawali Pers.
- Nuzulaili, D. D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Ump Terhadap Pengangguran Di Pulau Jawa 2017-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi (Jie)*, Vol. 6, No. 2.
- Oktaviani, R., & Lis Purnamadewi, Y. (2015). *Pengaruh Foreign Direct Investment Dan Afta Terhadap Kesempatan Kerja Sektoral Di Asean 5* (Vol. 4, Issue 2).
- Paramartha, D. G. K. C., & Suasih, N. N. R. (2021). Pengaruh Investasi Dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ep Unud, Issn: 2303-0178*, 451–463.